

Katalog: 9102055.6304



POTRET EKONOMI

HASIL PENCAHAHAN LENGKAP SENSUS EKONOMI 2016

POTENSI EKONOMI KABUPATEN BARITO KUALA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO KUALA**

POTRET EKONOMI

HASIL PENCACAHAN LENGKAP SENSUS EKONOMI 2016

POTENSI EKONOMI KABUPATEN BARITO KUALA



**Potret Ekonomi Kabupaten Barito Kuala
(Hasil Pencacahan Lengkap SE 2016)
Potensi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala**

No. Publikasi: 6304.1725

Katalog: 9102055.6304

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman: vi + 63 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala

Penyunting:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala

Dicetak oleh:

CV. Karya Bintang Musim

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar



Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) merupakan sensus ekonomi keempat yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali sejak 1986. Pelaksanaan SE2016 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.

Pelaksanaan SE2016 dilakukan secara bertahap, yaitu pencacahan usaha di luar lapangan usaha pertanian, administrasi pemerintahan dan aktivitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sendiri, yang dilaksanakan pada Mei 2016, kemudian dilanjutkan dengan pendataan rinci usaha melalui survei SE2016 lanjutan pada tahun 2017.

Buku ini disusun untuk memberi gambaran awal seputar potensi ekonomi Kabupaten Barito Kuala, salah satu datanya adalah hasil SE2016. Di samping itu, publikasi ini juga menyajikan pembahasan mengenai beberapa karakteristik lapangan usaha yang menjadi unggulan di Kabupaten Barito Kuala.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih.

Marabahan, November 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Barito Kuala

Ir. H. Muchyar, MP

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1	1
Potensi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala	
Sumber Daya Manusia Melimpah sebagai Pelaku Ekonomi Utama	3
Sumber Utama Penggerak Ekonomi Kabupaten Barito Kuala	7
Bab 2	9
Tantangan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala	
Infrastruktur Belum Merata	11
Kualitas Sumber Daya Manusia Relatif Masih Rendah	14
Bayang-Bayang Kemiskinan dan Ketimpangan	15
Bab 3	17
Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala untuk Pemerataan Pembangunan	
Penggerak Utama Ekonomi Kabupaten Barito Kuala	19
Mendorong Potensi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala	20
Bab 4	27
Investasi untuk Mempercepat Pembangunan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala	
Peran Sektor Konstruksi dalam Pembentukan Investasi	29
Sektor Konstruksi didominasi Usaha Kecil	32
Bab 5	35
Membangkitkan Kembali Industri Pengolahan Kabupaten Barito Kuala	
Industri Pengolahan Tumbuh Tertekan	37
Potensi IMK dalam Mendorong Ekonomi	38
Bab 6	41
Pendidikan dan Kesehatan dalam Pembangunan Manusia di Kabupaten Barito Kuala	
Capaian Pendidikan dan Kesehatan Sangat Baik	43
Potensi IMK dalam Mendorong Ekonomi	44

Bab 7	47
Perdagangan dan Penyediaan Makan Minum dapat Menunjang Pembangunan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala	
Peran Perdagangan dan Penyediaan Makan Minum dalam Ekonomi	49
Strategi Permintaan-Penawaran dalam Mendorong Perdagangan dan Penyediaan Makan-Minum	50
Inti Sari	53
Catatan Teknis	57



bab

1



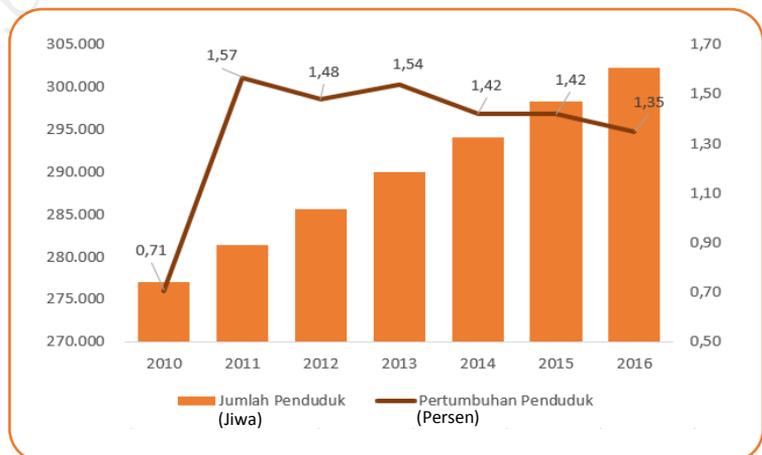
Potensi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

Potensi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

1. Sumber Daya Manusia Melimpah sebagai Pelaku Ekonomi Utama

Suksesnya pembangunan perekonomian yang dilakukan tergantung pada tiga hal yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Sumber daya alam diperlukan sebagai input dalam perekonomian. Sedangkan sumber daya manusia dan modal berperan dalam proses ekonomi. Ketiga hal ini sangat penting terutama sumber daya manusia. Sumber daya alam dan modal yang melimpah, tidak akan dapat menghasilkan output yang berkualitas apabila dikelola secara sembarangan oleh manusia. Sebaliknya, sumber daya alam dan modal yang terbatas, akan menghasilkan output yang maksimal apabila dikelola dengan baik oleh manusia.

Gambar 1.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (proyeksi)

Pentingnya peran sumber daya manusia tersebut, menjadikan jumlah dan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah menjadi indikator penting yang harus diperhatikan. Jumlah penduduk yang besar harus dimanfaatkan sehingga dapat menghasilkan perekonomian yang maju. Sebaliknya, pertumbuhan jumlah penduduk yang besar malah akan membebani perekonomian apabila tidak ditangani dengan serius.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Jiwa)

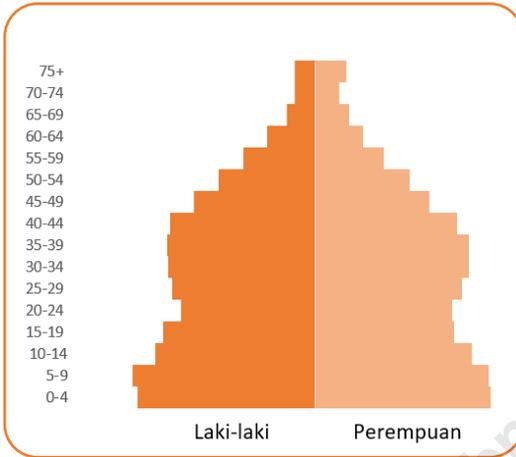
Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Persentase
Tanah Laut	329 286	8,12
Kota Baru	325 827	8,03
Banjar	563 062	13,88
Barito Kuala	302 304	7,45
Tapin	184 330	4,55
HSS	229 889	5,67
HST	263 376	6,49
HSU	228 528	5,64
Tabalong	243 477	6,00
Tanah Bumbu	334 314	8,24
Balangan	125 534	3,10
Kota Banjarmasin	684 183	16,87
Kota Banjarbaru	241 369	5,95
KALIMANTAN SELATAN	4 055 479	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan (proyeksi)

Pada tahun 2016, penduduk Barito Kuala sebanyak 302.304 jiwa. Jumlah ini tumbuh 1,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dilihat 6 tahun terakhir, jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 277.090 jiwa, maka rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,35 persen per tahun. Penduduk Barito Kuala ini menjadi penduduk terbanyak ke 6 se-Kalimantan Selatan, atau sebesar 7,45 persen dari total penduduk Kalimantan Selatan.

Memahami peranan penduduk dalam perekonomian perlu dilihat pada penduduk usia kerja, yaitu penduduk dengan usia 15-64 tahun. Penduduk ini diharapkan dapat aktif dalam perekonomian. Artinya roda pembangunan ekonomi berada di tangan penduduk usia ini. Struktur penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2016 terlihat sebagai struktur wilayah yang sedang berkembang. Komposisi penduduk usia 15-64 tahun cukup besar. Dengan struktur penduduk seperti ini, penduduk menjadi modal yang sangat baik untuk membangun. Diharapkan partisipasi penduduk di usia ini pada perekonomian juga besar sehingga dapat mendorong pembangunan Kabupaten Barito Kuala.

Gambar 1.2. Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016



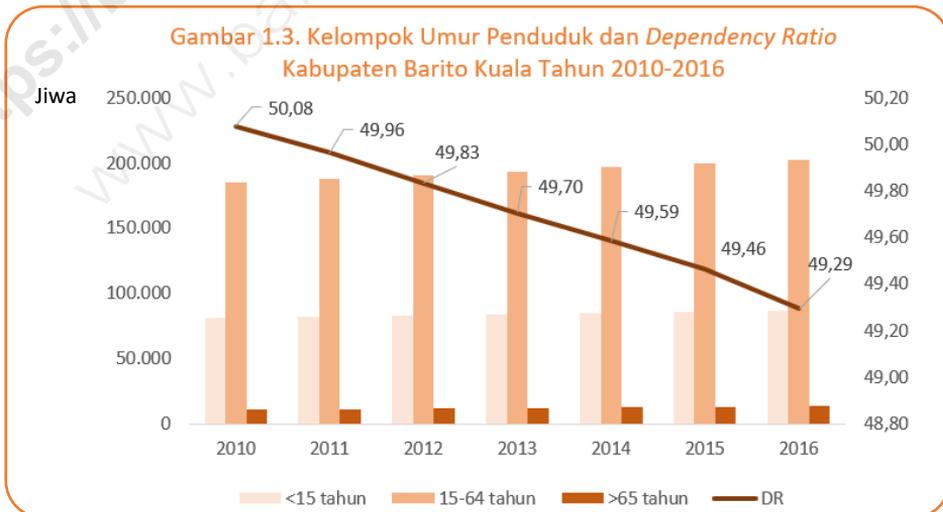
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (proyeksi)

Penduduk usia kerja ini adalah penduduk yang produktif bagi perekonomian. Mereka menjadi tumpuan bagi penduduk usia anak-anak dan lanjut usia. Penduduk bukan usia kerja ini tidak dapat berperan aktif

dalam perekonomian. Mereka hanya menikmati dari apa yang dihasilkan penduduk usia produktif. Untuk melihat seberapa besar ketergantungan penduduk usia tidak produktif ini kepada mereka yang produktif, digunakan Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*).

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif dengan penduduk yang produktif. Semakin besar angka rasio ketergantungan, maka beban ekonomi akan semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio ketergantungan, maka akan semakin efektif suatu perekonomian. Fenomena inilah yang disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi terjadi jika dua orang penduduk usia produktif membiayai satu orang penduduk tidak produktif.

Gambar 1.3. Kelompok Umur Penduduk dan *Dependency Ratio* Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (proyeksi)

Di tahun 2016, *Dependency Ratio* Kabupaten Barito Kuala bernilai 49,29. Artinya dua orang penduduk usia produktif membiayai satu orang penduduk usia tidak produktif. Bahkan, nilai *DR* selalu turun setiap tahunnya. Hal ini berarti Kabupaten Barito Kuala memasuki masa-masa yang sangat baik dalam pembangunan perekonomian. Hasil dari perekonomian dapat dimanfaatkan betul tanpa harus banyak terbebani dengan penduduk usia tidak produktif.

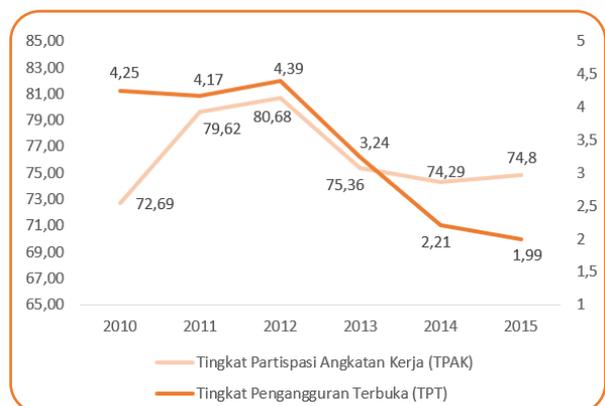
Penduduk usia kerja yang besar menjadi modal utama dalam membangun ekonomi. Diantara penduduk-penduduk usia kerja ini, terdapat penduduk angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja, adalah penduduk usia kerja yang tidak sedang bersekolah, ataupun mengurus rumah tangga dan lainnya. Penduduk angkatan kerja inilah yang benar-benar diharapkan berperan aktif dalam perekonomian.

Fokus pada penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja ini menjadi sangat penting guna meningkatkan partisipasinya dalam perekonomian. Apabila penduduk ini tidak banyak terlibat dalam perekonomian, akan banyak penduduk angkatan kerja yang menjadi pengangguran sehingga potensi yang besar ini akan menjadi sia-sia atau

bahkan akan menjadi beban bagi perekonomian.

Tahun 2015, angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Barito Kuala sebesar 74,8 persen. Artinya sebanyak 74,8 persen dari jumlah penduduk usia kerja aktif berpartisipasi dalam perekonomian. Jumlah ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2010 TPAK bernilai 72,69 persen. Selain itu, pengangguran di Kabupaten Barito Kuala terus menurun. Tahun 2010, 4,25 persen penduduk angkatan kerja menganggur, turun menjadi hanya 1,99 persen di tahun 2015. Kondisi ini sangat baik dalam hal sosial ekonomi, sehingga diharapkan mampu memberikan pengaruh pada faktor produksi dalam ekonomi khususnya tenaga kerja.

Gambar 1.4. TPAK dan TPT Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010-2015 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (SAKERNAS)

2. Sumber Utama Penggerak Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

Dalam pembangunan ekonomi perlu melihat sektor-sektor mana yang menjadi unggulan agar pembangunan lebih terarah. Sektor yang unggul perlu terus didorong agar semakin maju. Sektor potensial perlu didukung agar menjadi sektor unggulan. Dan yang tertinggal perlu menjadi perhatian.

Tabel 1.2. Nilai PDRB Berlaku Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016** (Juta Rupiah)

Kategori	Nilai	Persen
A	1 945 141,07	28,41
B	6 052,36	0,09
C	1 186 640,73	17,33
D	6 495,98	0,09
E	17 436,93	0,25
F	905 650,39	13,23
G	783 277,10	11,44
H	240 484,75	3,51
I	165 301,01	2,41
J	132 845,52	1,94
K	128 211,47	1,87
L	231 723,79	3,38
M,N	10 418,58	0,15
O	554 868,97	8,10
P	387 106,11	5,65
Q	90 784,48	1,33
R,S,T,U	54 246,55	0,79
PDRB	6 846 685,79	100,00

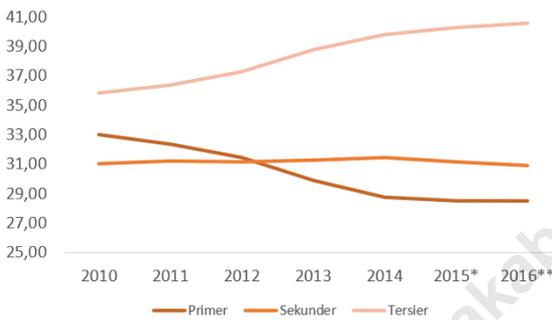
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (PDRB Lapangan Usaha)

Perekonomian Barito Kuala masih didominasi oleh kategori A, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lebih dari seperempat PDRB (sebesar 28,41 persen) diperoleh dari sektor pertanian. Artinya pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung dari sektor ini. Bahkan, ekonomi Kalimantan Selatan di sektor pertanian bertopang pada keberhasilan sektor pertanian di Barito Kuala. Namun perlu diperhatikan bahwa sektor ini sangat bergantung dengan alam. Saat terjadi gejolak dengan alam, misalnya perubahan cuaca menjadi sangat panas, akan sangat berpengaruh dengan penurunan sektor ini.

Jika dilihat perkembangan peranan sektor-sektor ini, mulai terjadi pergeseran ekonomi. Sektor primer diantaranya kategori pertanian mulai berkurang dan beralih ke sektor sekunder dan tersier. Pergeseran ini menunjukkan bahwa perekonomian mulai tidak bergantung dengan alam, namun bergantung dari kemampuan tenaga kerjanya. Mulai banyak tenaga kerja yang dapat memanfaatkan hasil alam untuk menjadi output bernilai jual lebih tinggi. Mulai banyak tenaga kerja kreatif dalam menghasilkan output sehingga output lebih laku di pasaran. Juga mulai banyak tenaga kerja yang berbisnis online dalam memasarkan produknya. Hasil SE2016 jumlah usaha di luar sektor pertanian sebanyak

30.637 usaha. Dapat dikatakan bahwa jumlah usaha di luar kategori pertanian Kabupaten Barito Kuala tumbuh pesat selama 10 tahun terakhir.

Gambar 1.5. Kontribusi Sektor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010-2016 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (PDRB Lapangan Usaha)

Struktur ekonomi Barito Kuala ini terlihat berbeda dengan kondisi perekonomian Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan bergantung dengan pertambangan, khususnya batu bara. Karena perbedaan ini, Barito Kuala masih dapat bertahan dengan adanya penurunan produksi batu bara Kalimantan Selatan. Di saat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan melambat, pertumbuhan Barito Kuala masih terus maju. Namun perlambatan ekonomi Kalimantan Selatan ini dapat menjadi pelajaran bagi Kabupaten Barito Kuala, bahwa apabila

perekonomian terlalu tergantung dengan sektor primer suatu saat perekonomian dapat terganggu apabila faktor alam tidak diperhatikan.

Gambar 1.6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2016 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan (PDRB Lapangan Usaha)

bab
2



**Tantangan Ekonomi
Kabupaten Barito Kuala**

Tantangan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

1. Infrastrukur Belum Merata

Bank Dunia (1994) membagi infrastruktur ke dalam tiga jenis yaitu infrastruktur ekonomi, sosial, dan institusi. Infrastruktur ekonomi meliputi *public utilities* (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas); *public works* (bendungan, saluran, irigasi, dan drainase), serta transportasi (jalan, kereta api, pelabuhan, dan lapangan terbang). Sementara infrastruktur sosial meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Sedangkan infrastruktur institusi meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi, dan lainnya.

Ketersediaan infrastruktur yang baik di suatu daerah dapat mendorong peningkatan produktivitas output dan tenaga kerja pada perekonomian wilayah tersebut. Infrastruktur sosial dan institusi yang baik akan meningkatkan kualitas pada manusia itu sendiri yang kemudian akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan infrastruktur ekonomi yang baik dapat menunjang proses produksi dan distribusi sehingga akan berdampak pada peningkatan output.

Sayangnya ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala masih belum sebaik yang diharapkan. Walaupun terjadi perbaikan dan penambahan infrastruktur setiap tahunnya, namun masih perlu selalu ditingkatkan guna menunjang pembangunan ekonomi. Jalan yang berstatus baik masih sekitar 60 persen. Padahal jalan ini sebagai penghubung dalam distribusi baik input maupun output. Input ekonomi yang berasal dari dalam wilayah bisa saja berasal dari kecamatan yang berbeda dengan lokasi produksi.

Begitu juga dengan output suatu ekonomi, harus bisa dipasarkan keluar wilayah yang kemudian akan meningkatkan ekspor.

Tabel 2.1. Panjang Jalan menurut Jenisnya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015-2016 (Kilometer)

Jenis	2015	2016
Aspal	366,9	377,1
Kerikil	239,7	132,9
Tanah	21,5	118,1
Jumlah	628,1	628,1

Sumber : Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2015-2016

Letak geografis Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian. Belum lagi ditambah wilayah Kabupaten Barito Kuala yang menjadi penghubung antara Kota Banjarmasin dan Kota Kapuas. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Barito Kuala secara umum dengan meningkatkan produktivitasnya.

Selain infrastruktur jalan, yang juga penting dalam aktivitas ekonomi adalah pasar. Pasar adalah tempat yang menghubungkan produsen dan

konsumen. Ketersediaan pasar di setiap kecamatan maupun desa dapat memperlancar dan mempermudah daya beli yang kemudian akan mendorong permintaan dan dapat menarik penawaran dari produsen.

Tabel 2.2. Banyaknya Desa yang Ber-Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014

Kecamatan	Perma- nen	Semi Perma- nen	Tanpa Bangun- an
Tabunganen	0	3	2
Tamban	0	3	4
Mekarsari	0	3	2
Anjir Pasar	0	3	0
Anjir Muara	1	2	2
Alalak	1	2	9
Mandastana	0	4	2
Jejangkit	0	2	1
Belawang	0	1	4
Wanaraya	0	4	2
Barambai	0	3	1
Rantau Badauh	1	2	3
Cerbon	0	1	2
Bakumpai	0	0	4
Marabahan	1	1	1
Tabukan	0	1	3
Kuripan	0	3	2
Jumlah	4	38	44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (PODES2014)

Dari data PODES 2014, pasar di Kabupaten Barito Kuala belum merata di semua desa. Pasar yang ada pun sebagian besar tanpa bangunan. Sebanyak 44 desa memiliki pasar tanpa bangunan dan 38 desa memiliki pasar dengan bangunan semi permanen. Sedangkan pasar dengan bangunan permanen hanya terdapat di 4 desa. Selain itu, kondisi pasar yang hanya beroperasi seminggu sekali dapat menghambat pembangunan ekonomi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah guna mendorong daya beli masyarakat.

Kesenjangan juga terjadi pada ketersediaan infrastruktur sosial. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dapat menunjang tenaga kerja sebagai pelaku ekonomi utama, masih belum merata. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas, sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Dari total 63 puskesmas, ada beberapa kecamatan yang hanya memiliki satu atau dua puskesmas. Sementara rumah sakit hanya berada di Kecamatan Marabahan dan klinik di Kecamatan Alalak. Selain fasilitas pendidikan formal, juga diperlukan sarana-sarana untuk membantu meningkatkan *skill* calon tenaga kerja, seperti Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Balai Latihan Transmigrasi (Balatrans).



Sumber : Barito Kuala Dalam Angka 2016

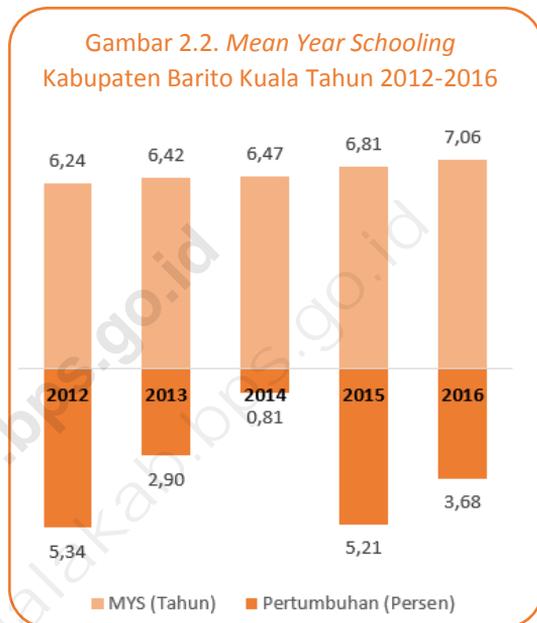
2. Kualitas Sumber Daya Manusia Relatif Masih Rendah

Telah dijelaskan di BAB I bahwa sumber daya manusia sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Smith (2003) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja saling berkaitan dan saling menguatkan. Dalam menciptakan ekonomi yang kuat, tenaga kerja yang berkualitas adalah syarat yang harus dipenuhi. Ekonomi akan menjadi kuat jika ditunjang oleh produktivitas yang tinggi.

Menurut Todaro dan Smith (2015) pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan produktivitas. Pendidikan secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas. SDM yang berpendidikan tinggi dapat menggunakan faktor produksi lain dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produksi.

Kualitas SDM penduduk Kabupaten Barito Kuala masih harus menjadi perhatian lebih. Penduduk Barito Kuala usia 25 tahun ke atas, rata-rata memiliki pendidikan setara kelas 1 SMP. Data dari komponen rata-rata lama sekolah dalam IPM ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk harus selalu di tingkatkan. Walaupun *Mean Year Schooling* (rata-rata lama sekolah) ini

terus meningkat setiap tahunnya, namun masih harus selalu ditingkatkan.

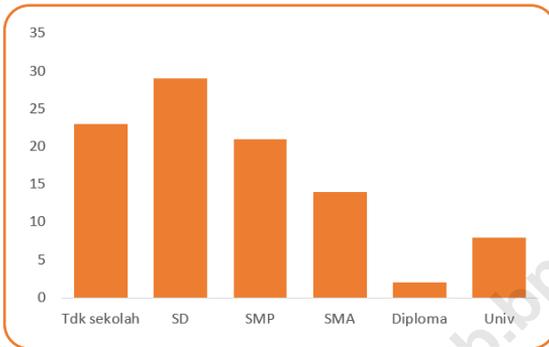


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (Indeks Pembangunan Manusia)

Apabila dilihat dari sisi tenaga kerja, kualitas tenaga kerja Kabupaten Barito Kuala juga cenderung masih rendah. Data dari Sakernas menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk yang bekerja tidak tamat SD dan tamat SD. Hanya sedikit yang berpendidikan perguruan tinggi. Disamping kurang maksimalnya produktivitas, rendahnya pendidikan tenaga kerja ini juga akan menurunkan daya tawar tenaga kerja bagi investor

dari luar yang akan turut membangun perekonomian Kabupaten Barito Kuala.

Gambar 2.3. Pendidikan Penduduk yang Bekerja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (SAKERNAS)

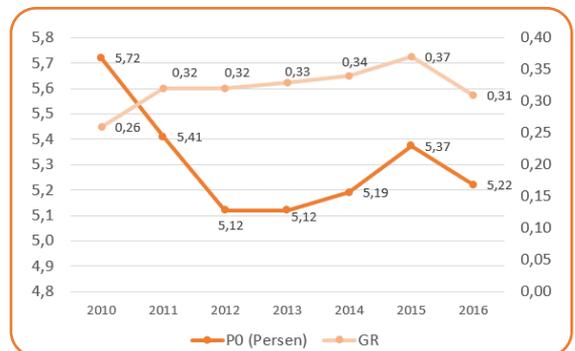
3. Bayang-bayang Kemiskinan dan Ketimpangan

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Namun menurut Bourgoignon (2008), pertumbuhan ekonomi tidak dapat secara langsung dapat mengurangi kemiskinan. Terdapat variabel ketimpangan dalam kedua variabel tersebut. Banyak daerah yang hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya tanpa melihat ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi hanya ditopang dan dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas sehingga

penduduk miskin semakin terpuruk. Sementara, banyak daerah yang tidak berfokus pada pemerataan sehingga pengurangan penduduk miskin berjalan lambat.

Kabupaten Barito Kuala cukup berhasil dalam mengurangi kemiskinan. Data dari Susenas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin tahun 2016 sebesar 5,22 persen. Nilai ini turun signifikan dari tahun 2010 yang sebesar 5,72 persen. Apabila mengacu pada kriteria bank Dunia, 40 persen penduduk dengan pendapatan terbawah menerima 16 persen dari seluruh total pendapatan di Kabupaten Barito Kuala.

Gambar 2.4. Kemiskinan dan Gini Ratio Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 - 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (SUSENAS)

Gini Ratio dapat digunakan sebagai ukuran ketimpangan pendapatan. *Gini Ratio* bernilai antara 0

sampai dengan 1. Semakin dekat dengan angka 0, artinya ketimpangan semakin baik. Kabupaten Barito Kuala juga cukup berhasil mengurangi ketimpangan. *Gini Ratio* tahun 2016 bernilai 0,31. Nilai ini turun dari tahun sebelumnya. Namun yang perlu menjadi perhatian bahwa *gini ratio* ini cenderung naik jika dilihat dari tahun 2010. Hal ini harus diantisipasi agar tidak berlanjut. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus berpihak pada si miskin. Pertumbuhan yang terus dikejar tidak boleh hanya dinikmati oleh si kaya. Ketimpangan harus selalu ditekan.

Selain mengurangi kemiskinan, perekonomian yang terbangun harus berimbang dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Daya beli dapat meningkat salah satunya disebabkan dengan meningkatnya pendapatan. Masyarakat semakin mudah membeli kebutuhan hidupnya apabila pendapatan meningkat.

Kabupaten Barito Kuala masih harus memberikan perhatian khusus terkait isu daya beli. Daya beli masyarakat Barito Kuala masih tergolong rendah. Data IPM komponen pengeluaran menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat Barito Kuala sebesar 9,2 juta per orang per tahun. Nilai pada komponen ini telah disesuaikan secara nasional sehingga dapat dibandingkan dengan daerah lain. Jika dibandingkan dengan nilai Provinsi

Kalimantan Selatan secara umum, nilai ini masih cukup jauh. Penduduk Kalimantan Selatan memiliki pengeluaran sebesar 11,31 juta rupiah per orang per tahun.

Tabel 2.3. Pengeluaran yang Disesuaikan menurut Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Kab/Kota	Pengeluaran per orang-per tahun
Tanah Laut	10,86
Kota Baru	10,77
Banjar	12,31
Barito Kuala	9,23
Tapin	11,24
HSS	11,62
HST	11,53
HSU	8,67
Tabalong	10,62
Tanah Bumbu	11,01
Balangan	10,95
Kota Banjarmasin	13,42
Kota Banjarbaru	12,88
KALIMANTAN SELATAN	11,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (Indeks Pembangunan Manusia)

bab
3



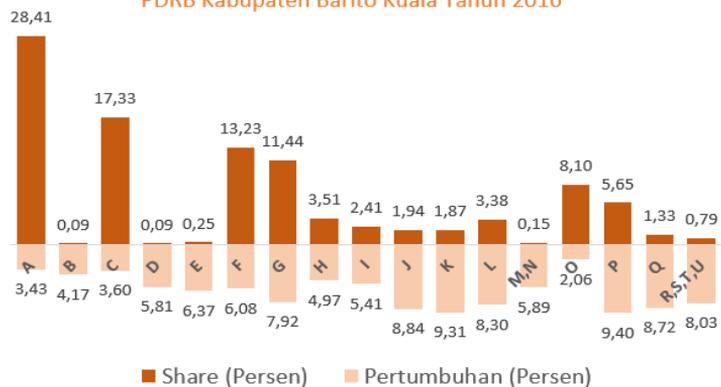
**Pengembangan Potensi Ekonomi
Kabupaten Barito Kuala
Untuk Pemerataan Pembangunan**

Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala untuk Pemerataan Pembangunan

1. Penggerak Utama Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

Dinamika dan arah pergerakan ekonomi suatu daerah dapat dipantau dari mesin penggerak ekonominya. Dengan kata lain, penggerak perekonomian dapat menjadi rambu-rambu untuk melihat bagaimana perekonomian sedang berjalan. Saat perekonomian sedang tumbuh pesat, ini berarti penggerakanya sedang dalam kinerja terbaik. Namun saat perekonomian sedang melambat, bisa jadi penggerakanya sedang tidak bekerja optimal. Penggerak ekonomi Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari sisi Lapangan Usaha, baik dari sisi sumbangannya kepada perekonomian maupun dari penyerapan tenaga kerjanya.

Gambar 3.1. Share dan Pertumbuhan Ekonomi per Kategori PDRB Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (PDRB Lapangan Usaha)

PDRB dapat menjelaskan bagaimana sektor-sektor tumbuh setiap tahunnya. Sehingga dapat dideteksi, bagaimana kinerja mesin penggerak perekonomian. Selama tahun 2011-2016, PDRB Kabupaten Barito Kuala tumbuh rata-rata 4,7 persen per tahun. Pertumbuhan ini tentunya ditopang oleh kategori-kategori yang memiliki peranan besar dalam PDRB.

Sebagai daerah dengan luas lahan sawah yang besar, wajar jika wilayah Barito Kuala memiliki luas panen sebesar 100 ribu hektar pada tahun 2016. Luasan ini adalah yang paling luas diantara Kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Dengan luasan ini, produksi padi Barito Kuala sebanyak 334.345 ton, atau sebesar 16 persen dari total Kalimantan Selatan. Kondisi ini membuat pertanian menjadi penggerak utama Barito Kuala dengan kontribusinya pada perekonomian sebesar 28,41 persen dan tumbuh 3,43 persen pada tahun 2016.

Setelah sektor pertanian, sektor dengan *share* terbesar berikutnya adalah industri pengolahan. Bersama dengan pertanian, sektor ini menjadi penggerak utama roda perekonomian Kabupaten Barito Kuala dengan *share* sebesar 17,33 persen pada 2016. Namun sayangnya selama tahun 2010-2016, sektor ini tidak tumbuh dengan baik. Rata-rata sektor ini tumbuh 3,1 persen.

Selain kedua sektor tersebut, sektor perdagangan dan konstruksi juga perlu menjadi perhatian. Kedua sektor ini menjadi sektor dengan kontribusi ketiga dan ke-empat dalam perekonomian Kabupaten Barito Kuala. Kedua sektor ini juga tumbuh cukup pesat dengan rata-rata 6,6 persen untuk sektor konstruksi dan 7,2 persen untuk perdagangan. Tentunya dengan pertumbuhan cepat ini, kedua sektor ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian agar semakin kuat.

2. Mendorong Potensi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

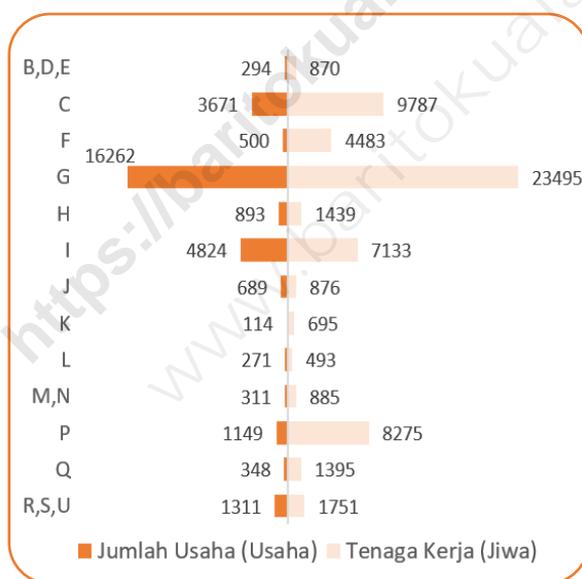
Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB I, ekonomi sedang bertransisi dari sektor primer ke sekunder dan tersier. Semakin banyak usaha-usaha berkembang di luar sektor pertanian dan pertambangan. Berdasarkan hasil SE2016, jumlah usaha di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 30.637 usaha. Sektor dengan usaha terbanyak adalah perdagangan besar dan eceran dengan jumlah usaha sebanyak 16.262 usaha. Disusul penyediaan akomodasi dan makan minum sebanyak 4.824 usaha. Berikutnya, terbanyak ketiga industri pengolahan dengan jumlah usaha 3.671 usaha. Sektor-sektor inilah yang sepatutnya terus dipacu, agar terus dapat menopang perekonomian, atau

mungkin bahkan menjadi mesin penggerak utama.

Usaha-usaha ini juga dapat menyerap tenaga kerja yang besar. Dari total 61.577 tenaga kerja seluruh Barito Kuala, 23.495 diantaranya bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor industri pengolahan juga menyerap sangat banyak tenaga kerja 9.787 orang dan penyediaan makan minum 7.133 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ini memang potensial untuk dikembangkan ke depan.

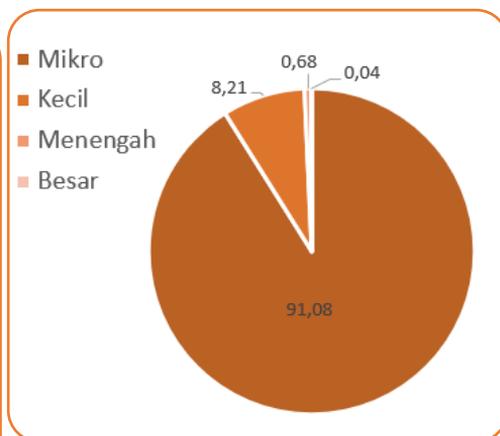
Apabila dilihat dari skala usaha, yang menjamur adalah Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari total jumlah usaha 30.637 usaha, 99 persen diantaranya adalah UMK. Usaha Mikro dan Kecil ini adalah usaha-usaha yang tidak membutuhkan modal besar untuk memulai usaha, namun juga rentan bangkrut apabila terjadi suatu gejolak ekonomi. Sehingga perlu menjadi perhatian agar penyaluran modal terhadap usaha-usaha ini tidak terhambat demi menjamin kelangsungan usaha ini.

Gambar 3.2. Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Kategori Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (SE2016)

Gambar 3.3. Persentase Jumlah Usaha Menurut Skala Usaha Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (SE2016)

Dalam mengembangkan potensi ekonomi wilayah Barito Kuala, pemerintah daerah telah menyusun *masterplan* dan kebijakan. Salah

satunya tertuang dalam RPJMD 2011-2016. *Masterplan* tersebut merupakan kelanjutan dan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dari *masterplan* sebelum-sebelumnya dan tentunya akan dilanjutkan dengan program 5 tahunan berikutnya.

Selain berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, potret potensi ekonomi di suatu wilayah dapat dipetakan dengan data yang akurat berdasarkan potensi sumber daya. Keunggulan setiap sektor menarik untuk dikaji, sehingga pemetaan kegiatan ekonomi menjadi lebih jelas dan tepat. Karena setiap daerah pastinya memiliki keunggulan masing-masing.

Data hasil SE2016 mampu menunjukkan potensi ekonomi tersebut. Data SE2016 juga menyediakan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan tenaga kerja di luar sektor pertanian. Oleh sebab itu, informasi ini sangat penting dalam melihat potensi dari nilai ekonomi suatu wilayah. Ketersediaan data yang lengkap jika ditunjang metodologi yang tepat akan menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Untuk mengukur potensi ekonomi di suatu wilayah terdapat tiga metode yaitu:

1. *Regional Account (Income – Expenditure) Approach* yang mengukur nilai ekonomi dari suatu wilayah

berdasarkan produk atau kegiatan ekonomi pada setiap sektor di suatu wilayah.

2. *Input – Output Approach* yang mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah dari nilai pemanfaatan faktor produksi atau input baik yang tersedia di wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain untuk menghasilkan output tertentu.

3. *Economic Base Approach* yaitu dengan mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi sehingga menghasilkan kelompok struktur perekonomian daerah menjadi sektor unggulan dan bukan unggulan

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah, beberapa metode pengukuran yang umum digunakan antara lain *Location Quotient (LQ)*, Analisis *Shift-Share*, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan *Tipologi Klassen*. Penjelasan mengenai metode-metode tersebut terdapat pada bagian “Catatan Teknis”.

Keempat metode di atas dapat digunakan untuk menganalisis hasil SE2016 agar dapat memetakan mana saja kategori unggulan dan potensial. Berikut disajikan hasil penggunaan metode tersebut untuk Kabupaten Barito Kuala.

1. Industri Pengolahan

- a. LQ tenaga kerja lebih dari 1, artinya lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dari sisi jumlah tenaga kerja.
- b. Berada di kuadran 2 pada *tipologi klassen*, lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala termasuk lapangan usaha berstatus unggulan tapi tertekan. Hal tersebut disebabkan karena *share* lapangan usaha tersebut lebih besar dibandingkan *share* lapangan usaha yang sama di Provinsi Kalimantan Selatan, namun pertumbuhannya lebih lambat.

2. Konstruksi

- a. LQ tenaga kerja lebih dari 1, artinya lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dari sisi jumlah tenaga kerja.
- b. PS dan DS bernilai positif artinya lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala tumbuh lebih cepat dan memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

- c. Rpip positif dan Rpin positif artinya lapangan usaha ini potensial di Kabupaten Barito Kuala dan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Berada di kuadran 1 pada *tipologi klassen*, lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala termasuk lapangan usaha berstatus unggulan dan tumbuh pesat. Hal tersebut disebabkan karena *share* dan pertumbuhan lapangan usaha tersebut lebih cepat dibandingkan *share* dan pertumbuhan lapangan usaha yang sama di Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Motor

- a. LQ tenaga kerja lebih dari 1, artinya lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dari sisi jumlah tenaga kerja.
- b. PS bernilai positif artinya lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Rpip positif dan Rpin positif artinya lapangan usaha ini potensial di Kabupaten Barito Kuala dan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

- d. Berada di kuadran 2 pada *tipologi klassen*, lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala termasuk lapangan usaha berstatus unggulan tapi tertekan. Hal tersebut disebabkan karena *share* lapangan usaha tersebut lebih cepat dibandingkan *share* lapangan usaha yang sama di Provinsi Kalimantan Selatan, namun pertumbuhannya lebih lambat.
4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 - a. PS dan DS bernilai positif artinya lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala tumbuh lebih cepat dan memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b. Rpip positif dan Rpin positif artinya lapangan usaha ini potensial di Kabupaten Barito Kuala dan diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - c. Berada di kuadran 1 pada *tipologi klassen*, lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala termasuk lapangan usaha berstatus unggulan dan tumbuh pesat. Hal tersebut disebabkan karena *share* dan pertumbuhan lapangan usaha tersebut lebih cepat dibandingkan *share* dan pertumbuhan lapangan usaha yang sama di Provinsi Kalimantan Selatan.
 5. Jasa Pendidikan
 - a. LQ tenaga kerja lebih dari 1, artinya lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatandari sisi jumlah tenaga kerja.
 - b. PS dan DS bernilai positif artinya lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala tumbuh lebih cepat dan memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - c. Rpip positif dan Rpin positif artinya lapangan usaha ini potensial di Kabupaten Barito Kuala dan diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - d. Berada di kuadran 1 pada *tipologi klassen*, lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala termasuk lapangan usaha berstatus unggulan dan tumbuh pesat. Hal tersebut disebabkan karena *share* dan pertumbuhan lapangan usaha tersebut lebih cepat dibandingkan *share* dan pertumbuhan lapangan usaha yang sama di Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
 - a. PS dan DS bernilai positif artinya lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala tumbuh lebih cepat dan memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
 - b. Rpip positif dan Rpin positif artinya lapangan usaha ini potensial di Kabupaten Barito Kuala dan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - c. Berada di kuadran 3 pada tipologi klassen, lapangan usaha ini di Kabupaten Barito Kuala termasuk lapangan usaha berstatus potensial. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan lapangan usaha tersebut lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan usaha yang sama di Provinsi Kalimantan Selatan, namun *share*-nya lebih kecil.

Tabel 3.1.1. Rekapitulasi Hasil Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Barito Kuala

Kategori	LQ	Shift Share		MRP		Kuadran Klassen
		PS	DS	Rpip	Rpin	
B,D,E	-	-	+	+	-	3
C	+	-	-	-	-	2
F	+	+	+	+	+	1
G	+	+	-	+	+	2
HJ	-	+	-	-	+	4
I	-	+	+	+	+	1
K,L,M,N	-	+	+	+	+	1
P	+	+	+	+	+	1
Q	-	+	+	+	+	3
R,S,U	-	-	+	+	-	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (SE2016)

bab **4**



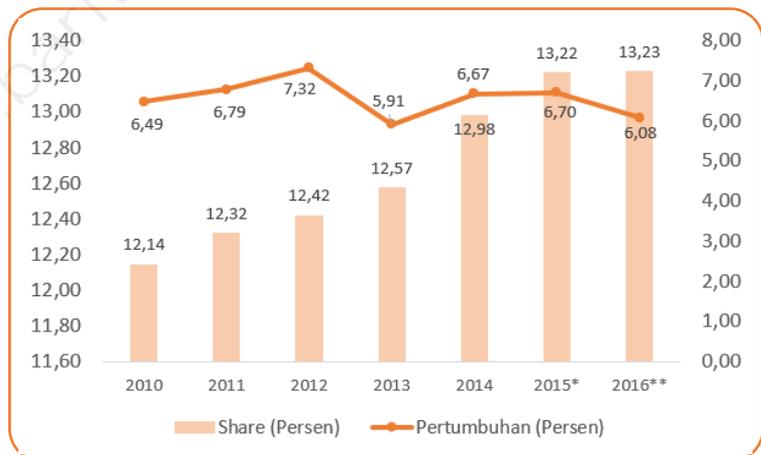
**Investasi Untuk Mempercepat
Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Barito Kuala**

Investasi untuk Mempercepat Pembangunan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

1. Peran Sektor Konstruksi dalam Pembentukan Investasi

Telah dijelaskan di BAB II tentang pentingnya infrastruktur dalam menunjang perekonomian, khususnya infrastruktur *public utilities*. Infrastruktur ini seperti jalan yang dapat menunjang distribusi input dan output perekonomian. Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 4.1. Kontribusi dan Pertumbuhan Konstruksi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (PDRB Lapangan Usaha)

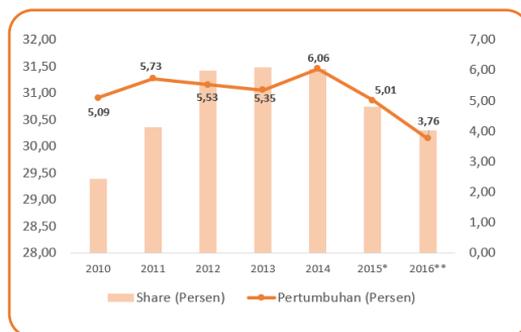
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sadar betul tentang pentingnya infrastruktur ini. Target pembangunan infrastruktur tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011-2016. Pada misi ke-empat, termaktub misi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan wilayah. Misi ini memiliki sasaran untuk pemerataan pembangunan agar mobilitas sosial ekonomi masyarakat lebih mudah.

Dari sisi PDRB lapangan usaha, sektor yang terkait dengan ini adalah kategori konstruksi. Sektor konstruksi adalah sektor yang berperan aktif membangun secara fisik. Namun, kategori ini tidak dapat menggambarkan secara langsung pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Karena di dalamnya juga termasuk pembangunan bangunan pribadi seperti pembangunan rumah, dll. Setidaknya pertumbuhan sektor ini dapat menunjukkan perkembangan pembangunan fisik secara keseluruhan.

Selama tahun 2010-2016, rata-rata kategori konstruksi tumbuh 6,6 persen per tahun. Pada tahun 2016, nilai tambah kategori ini bernilai 0,9 triliun rupiah atau sebesar 13,23 persen terhadap perekonomian Barito Kuala secara umum. Kategori ini menjadi terbesar ke-tiga dalam perekonomian Barito Kuala.

Dari sisi PDRB pengeluaran, komponen yang terkait dengan realisasi investasi adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen ini adalah sektor yang menggambarkan bagaimana investasi terbentuk. Namun, komponen ini tidak dapat memberikan gambaran secara langsung hasil pembangunan oleh pemerintah. Karena di dalam komponen ini juga termasuk investasi modal yang dapat berbentuk mesin dan peralatan ataupun hewan dan tumbuhan yang dapat dikategorikan sebagai modal. Setidaknya, pertumbuhan komponen ini dapat menunjukkan bagaimana investasi yang terbentuk secara umum memengaruhi perekonomian.

Gambar 4.2. Kontribusi dan Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (PDRB Pengeluaran)

Selama tahun 2010-2016, rata-rata pertumbuhan komponen PMTB sebesar 5,22 persen per tahun. Pada tahun 2016 PMTB bernilai 2,1 triliun rupiah atau sebesar 30,3 persen terhadap PDRB pengeluaran secara umum. PMTB ini menjadi yang terbesar ke-dua dalam komponen pengeluaran.

Kemudian muncul pertanyaan bagaimana pengaruh investasi ini terhadap output? Apakah investasi secara besar-besaran benar-benar mampu mendorong output perekonomian, ataukah hanya membuang sumber daya? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dengan indikator yang disebut ICOR (*Incremental capital-output ratio*). ICOR adalah perbandingan antara perubahan investasi terhadap perubahan output yang dihasilkan. Tahun 2016, ICOR Kabupaten Barito Kuala bernilai 0,258, artinya, untuk mendorong penambahan output sebesar 1 triliun rupiah, maka investasi harus ditambah sebesar 0,258 triliun rupiah.

Nilai ICOR selama 2011-2016 Kabupaten Barito Kuala cenderung turun setiap tahun. Kondisi ini memberikan kesimpulan bahwa ternyata penambahan investasi tidak banyak memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan didorong oleh komponen lain dalam PDRB Penggunaan, terutama komponen pengeluaran akhir rumah tangga.

Gambar 4.3. *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011-2016*



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (PDRB Pengeluaran)

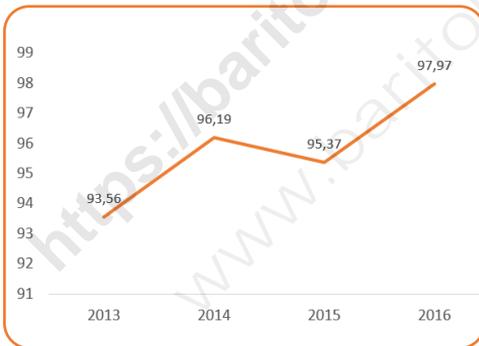
Dalam pembangunan juga perlu diperhatikan faktor harga, khususnya harga-harga bahan bangunan. Harga yang tinggi akan semakin memperberat proses pembangunan. Seharusnya, posisi geografis Kabupaten Barito Kuala dapat menguntungkan. Akses yang dekat dengan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kota Banjarmasin, dapat mempermudah akses sehingga harga akan lebih murah dibandingkan dengan wilayah lain.

Indikator yang dapat menunjukkan kondisi harga bahan-bahan bangunan adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). IKK disusun dengan membandingkan harga bahan-bahan bangunan di wilayah analisis dengan wilayah tertentu yang sama secara nasional, dalam hal ini adalah Kota Samarinda. Penghitungan IKK

menggunakan tiga jenis bangunan, yaitu bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan pekerjaan untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan serta bangunan lainnya.

Nilai IKK Kabupaten Barito Kuala tahun 2016 sebesar 97,97 persen. Ini berarti secara umum bahan bangunan di Kabupaten Barito Kuala lebih murah 98 persen dibandingkan dengan harga Kota Samarinda pada tahun dasar. Namun, apabila dilihat *trend* setiap tahun, angka ini cenderung naik. Kondisi ini perlu diperhatikan. Kenaikan harga yang terjadi perlu dijaga agar tidak menghambat pembangunan.

Gambar 4.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik (IKK)

2. Sektor Konstruksi didominasi Usaha Kecil

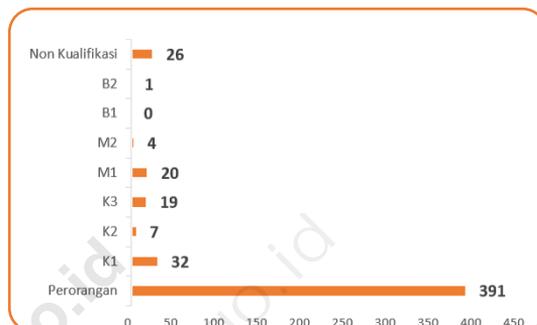
Dari sudut pandang jumlah usaha dan tenaga kerja, kategori konstruksi tidak dapat dipandang sebelah mata. Data hasil SE2016 menunjukkan bahwa kategori ini memiliki jumlah usaha yang cukup besar dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Dari total 30.637 usaha yang terjaring dalam SE2016 di Kabupaten Barito Kuala, sebanyak 500 diantaranya adalah usaha konstruksi atau sekitar 1,63 persen dari seluruh total usaha. Usaha sebanyak ini, mampu menyerap 4.483 orang, atau sebesar 7,3 persen dari seluruh tenaga kerja di Barito Kuala (di luar pertanian).

Populasi usaha konstruksi dapat terbagi ke dalam beberapa kualifikasi. Kualifikasi perusahaan adalah penggolongan perusahaan konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, dan atau kriteria penggunaan teknologi, dan atau kriteria besaran biaya. Berikut batasan setiap kualifikasi.

1. Perorangan : Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 300 juta
2. K1 : Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 1 Milyar

3. K2 : Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 1,75 Milyar
4. K3 : Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 2,5 Milyar
5. M1 : Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 10 Milyar
6. M2 : Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 50 Milyar
7. B1 : Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 250 Milyar
8. B2 : Tak Terbatas

Gambar 4.5. Jumlah Usaha Konstruksi Menurut Kualifikasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (SE2016)

Mengetahui pengkategorian ini sangat penting, agar ke depan dapat diperkirakan berapa kemampuan usaha konstruksi dapat menerima proyek pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Barito Kuala. Begitu juga dapat diperkirakan bagaimana usaha konstruksi perorangan dapat berkembang turut membangun infrastruktur sipil atau pribadi. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil SE2016 khusus untuk kategori Konstruksi. Dari gambar di bawah terlihat bahwa sebagian besar usaha konstruksi didominasi oleh perorangan. Usaha konstruksi berikutnya yang juga besar adalah K1 dan M1. Sementara yang mampu menerima proyek dengan nilai tak terbatas (usaha kategori B2) hanya berjumlah satu usaha.

<https://baritokualakab.bps.go.id>
www.baritokualakab.bps.go.id

bab **5**



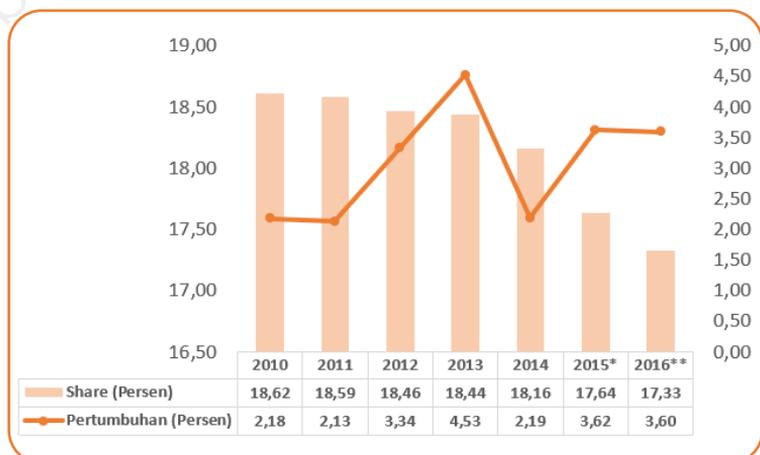
**Membangkitkan Kembali
Industri Pengolahan
Kabupaten Barito Kuala**

Membangkitkan Kembali Industri Pengolahan Kabupaten Barito Kuala

1. Industri Pengolahan Tumbuh Tertekan

Sesuai dengan pembahasan BAB II tentang potensi ekonomi, Industri pengolahan menjadi salah satu kategori yang perlu menjadi perhatian. Tipologi Klassen memberikan kesimpulan bahwa kategori ini adalah kategori unggulan yang sedang tertekan pertumbuhannya. Kesimpulan ini terjadi karena *share* kategori ini pada perekonomian Barito Kuala lebih besar daripada *share* kategori industri pengolahan pada perekonomian Kalimantan Selatan. Namun yang disayangkan adalah pertumbuhan kategori ini di Kabupaten Barito Kuala lebih kecil daripada pertumbuhan kategori yang sama di provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 5.1. Kontribusi dan Pertumbuhan Industri Pengolahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (PDRB Lapangan Usaha)

Di awal-awal pembangunan Kabupaten Barito Kuala, Kategori Industri pengolahan sangat maju ditopang oleh industri besar sedang. Sumber Daya Alam yang melimpah berbentuk kayu hutan menjadi penyebab banyak munculnya industri pengolahan kayu. Kayu-kayu hutan ini diolah menjadi kayu lapis yang kemudian di pasarkan bahkan diekspor ke luar wilayah. Namun seiring menipisnya sumber daya alam yang menjadi input di industri ini, industri pengolahan kayu lapis mulai menurunkan kapasitasnya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang gulung tikar karena tidak mendapat bahan baku kayu hutan sebagai input utamanya. Inilah yang menjadi salah satu sebab menurunnya Industri Pengolahan secara umum.

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Barito Kuala dari tahun ke tahun, peranan kategori ini pada ekonomi Kabupaten Barito Kuala terus meurun. Pada tahun 2010, peranan Industri Pengolahan sebesar 18,62 persen, menjadi 17,33 persen pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan sektor ini hanya sebesar 3,08 persen rata-rata per tahun. Sementara pertumbuhan kategori lain, lebih cepat daripada pertumbuhan kategori ini.

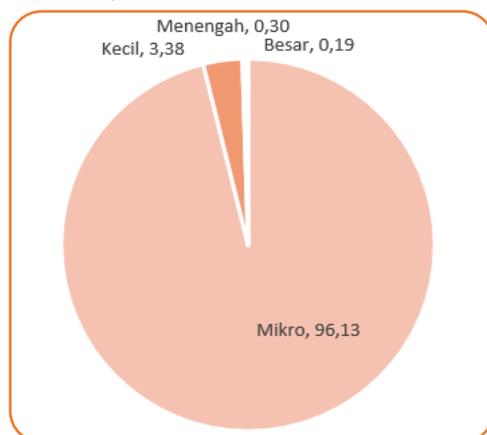
Secara regional Kalimantan Selatan, industri pengolahan tahun

2016 kepada perekonomian hanya sebesar 13,38 persen. Kategori ini di Kalimantan Selatan tumbuh 4,2 persen per tahun. Sehingga secara regional, Industri Pengolahan Barito Kuala masih mampu bersaing, namun pertumbuhannya tidak sebaik Industri Pengolahan secara umum di Kalimantan Selatan.

2. Potensi IMK dalam mendorong Ekonomi

Populasi usaha dalam industri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Industri Mikro Kecil (IMK) dan Industri Besar Sedang (IBS). Pengelompokan tersebut didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam produksi barang dan jasa pada industri bersangkutan.

Gambar 5.2. Persentase Jumlah Industri Pengolahan Menurut Skala Usaha Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015

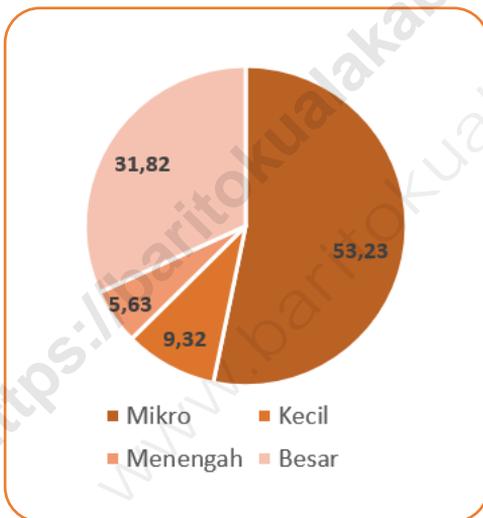


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (SE2016)

Pengelompokan IMB dan IMK adalah sebagai berikut:

1. Industri mikro : jumlah tenaga kerja 1-4 orang.
2. Industri kecil : jumlah tenaga kerja 5-19 orang.
3. Industri menengah : jumlah tenaga kerja 20-99
4. Industri besar : jumlah tenaga kerja 100 orang ke atas

Gambar 5.3. Persentase Tenaga Kerja Industri Pengolahan Menurut Skala Usaha Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (SE2016)

Belakangan ini Industri Pengolahan mulai bangkit. Namun tidak lagi ditopang oleh Industri Menengah Besar, melainkan oleh industri mikro kecil. Hasil SE2016 menunjukkan bahwa

dari total 3.671 usaha pada Industri Pengolahan, 99 persen diantaranya adalah Industri Mikro dan Kecil. Walaupun berskala kecil, namun dengan banyaknya jumlah usaha, kategori ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dari total 61.577 pekerja yang dijamin dalam SE2016, 15,89 persen diantaranya adalah bekerja di kategori industri pengolahan. Jika dirinci menurut skala usaha, 62,55 persen diantaranya bekerja di Industri Mikro dan Kecil. Dengan demikian, usaha-usaha kecil ini tidak hanya mampu menyokong perekonomian secara umum, namun juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam mengembangkan kualitas industri pengolahan khususnya IMK, yang perlu menjadi perhatian adalah modal. IMK ini memerlukan modal yang tidak banyak, namun mudah untuk bangkrut apabila terjadi gejolak. Menjaga stabilitas modal dirasa perlu untuk menjaga kelangsungan industri ini. Sayangnya penyaluran kredit bank yang dirilis oleh Bank Indonesia, kredit bagi industri pengolahan masih tidak banyak. Hanya sekitar 1,6 persen dari seluruh kredit tersalur ke sektor industri pengolahan. Kondisi ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan, untuk menjaga kestabilan usaha kecil, penyaluran kredit kepada sektor ini harus ditingkatkan.

Tabel 5.1. Penyaluran Kredit/Pinjaman menurut Sektor Ekonomi
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah)

Kategori	2014	2015	2016
Pertanian	11 391	11 290	101 803
Pertambangan	4 004	2 944	5 956
Industri Pengolahan	2 330	3 427	4 985
Listrik, Gas, dan Air	593	463	329
Konstruksi	38 850	41 324	41 448
Perdagangan	101 908	105 602	128 720
Pengangkutan	10 576	10 230	10 411
Keuangan	107 619	129 624	7 102
Jasa-Jasa	7 421	7 770	8 139
Jumlah	284 692	312 674	308 893

Sumber : Bank Indonesia (Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Kalimantan Selatan)



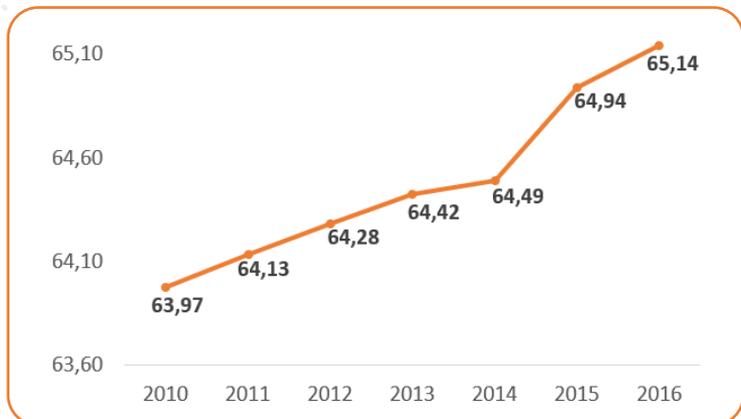
**Pendidikan dan Kesehatan Dalam
Pembangunan Manusia di
Kabupaten Barito Kuala**

Pendidikan dan Kesehatan dalam Pembangunan Manusia di Kabupaten Barito Kuala

1. Capaian Pendidikan dan Kesehatan Sangat Baik

Sudah dijelaskan bagaimana kualitas pendidikan manusia, dalam hal ini khususnya tenaga kerja. Semakin tinggi kualitas pendidikan tenaga kerja, maka semakin besar pula kemampuannya untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi lain. Begitu juga untuk kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat kesehatan, maka semakin tinggi produktivitas tenaga kerja tersebut. Sebab itu, pembangunan pendidikan dan kesehatan perlu selalu digalakkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum.

Gambar 6.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (Indeks Pembangunan Manusia)

Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011-2016. Pada misi ke-tiga RPJMD termuat misi “Mewujudkan Kualitas Manusia. Misi ini secara jelas memiliki sasaran bahwa pendidikan harus profesional, terjangkau, merata dan berkualitas. Pada misi tersebut juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat harus berkualitas.

Capaian pembangunan di bidang pendidikan tercermin dari capaian indeks kesehatan dan pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Kesehatan dalam IPM diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) diinterpretasikan sebagai berapa usia yang kemungkinan dicapai oleh bayi yang baru lahir di tahun tersebut. Sedangkan Indeks Pendidikan terdiri dari 2 indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah.

Tahun 2016 nilai Indeks Kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Kuala bernilai 65,14. Nilai ini rata-rata tumbuh 0,3 persen per tahun. Sementara nilai Indeks Pendidikan tahun 2016; Harapan Lama Sekolah (HLS) bernilai 11,92 dengan rata-rata pertumbuhan 1,4 persen per tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah bernilai 7,06 dengan rata-rata

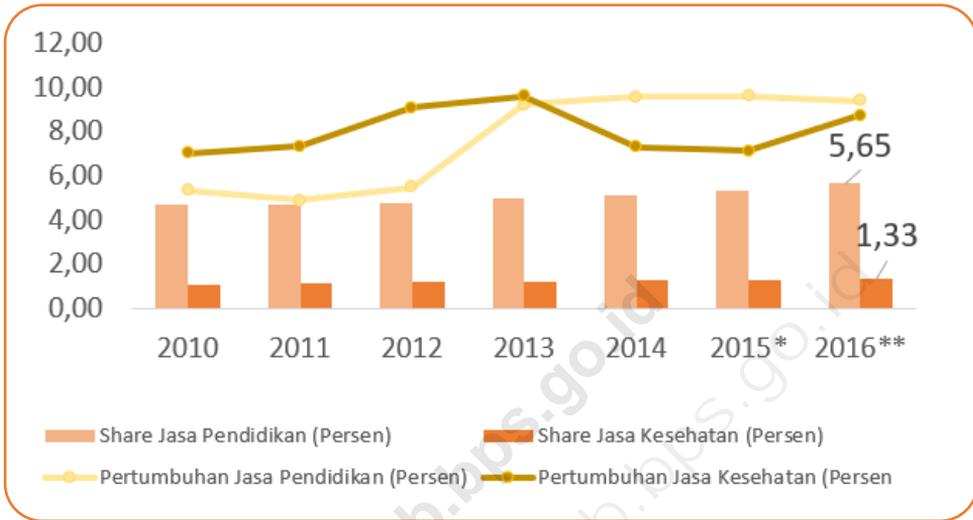
pertumbuhan cukup tinggi sebesar 3,7 persen per tahun.

2. Kontribusi Pendidikan dan Kesehatan

Capaian pembangunan pendidikan dan kesehatan dapat juga dilihat dari kontribusi sektor ini dalam PDRB Lapangan Usaha. Dari sisi ini, terlihat kontribusi kedua jasa tersebut kepada perekonomian secara umum. Tahun 2016 kontribusi kategori pendidikan sebesar 5,65 persen. Kontribusi pendidikan ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Sementara kategori kesehatan, kontribusi kepada PDRB sekitar 1,33 persen. Kontribusi kesehatan ini juga cenderung naik setiap tahun. Yang lebih menggembirakan, pertumbuhan kedua sektor ini sangat pesat. Kategori pendidikan tumbuh rata-rata 7,65 persen per tahun. Sementara kategori kesehatan tumbuh rata-rata 8,03 persen per tahun.

Dengan kontribusi seperti ini, tentunya terdiri dari banyak jumlah usaha. Kedua kategori ini tercatat dalam SE2016 memiliki jumlah usaha sebanyak 1.149 untuk pendidikan dan 348 untuk kesehatan. Usaha-usaha ini mampu menjangkau sebanyak 8.275 tenaga kerja atau sekitar 13,4 persen. Sementara kategori kesehatan mampu menyerap 1.395 orang atau sekitar 2,26 persen.

Gambar 6.2. Kontribusi dan Pertumbuhan Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (PDRB Lapangan Usaha)

<https://baritokualakab.bps.go.id>
www.baritokualakab.bps.go.id



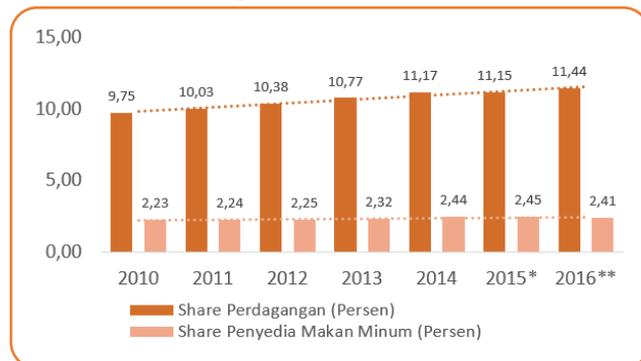
**Perdagangan dan Penyediaan
Makan Minum dapat
Menunjang Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Barito Kuala**

Perdagangan dan Penyediaan Makan Minum dapat Menunjang Pembangunan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

1. Peran Perdagangan dan Penyediaan Makan Minum dalam Ekonomi

Dalam PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terdiri dari dua sub kategori. Yang pertama, sub kategori perdagangan besar dan eceran. Perdagangan besar secara sederhana diartikan sebagai penghubung antara produsen dengan pedagang eceran. Sementara perdagangan eceran secara sederhana diartikan sebagai pedagang yang langsung menjual barang dagangannya kepada konsumen.

Gambar 7.1. Kontribusi Perdagangan dan Penyediaan Makan-Minum Kabupaten Barito Kuala 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (PDRB Lapangan Usaha)

Sedangkan dalam PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terdiri dari dua sub kategori. Yang pertama penyediaan akomodasi. Kedua, penyediaan makan dan minum. Di Kabupaten Barito Kuala penyediaan akomodasi kurang berperan pada kategori ini. Penyumbang terbesar adalah sub kategori penyediaan makan minum. Sehingga secara umum pergerakan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum hanya dipengaruhi oleh pergerakan sub kategori makan minum.

Seperti yang sudah dijelaskan, Perdagangan dan Penyediaan Makan Minum sebagai sektor jasa yang mulai berpengaruh terhadap perekonomian Barito Kuala. *Share* kedua kategori ini selalu meningkat setiap tahunnya. Kategori Perdagangan Tahun 2010 peranan kategori ini sebesar 9,75 persen pada tahun 2016 menjadi 11,44 persen. Begitu juga kategori Penyediaan Makan Minum. Tahun 2010 kategori ini berperan 2,23 persen menjadi 2,41 tahun 2016.

2. Strategi Permintaan-Penawaran dalam Mendorong Perdagangan dan Penyediaan Makan-Minum

Berdasarkan hasil SE2016, mayoritas usaha yaitu sebesar 53,08 persen berada pada kategori perdagangan. Sedangkan 15,75 persen

berada pada kategori penyediaan makan minum. Dengan jumlah sebesar ini, tentu saja mampu menyerap tenaga kerja yang juga besar. Hasil SE2016 juga menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di sektor ini juga besar. Sebesar 38,16 persen dari seluruh tenaga kerja yang tercakup dalam SE2016, diambil oleh sektor perdagangan dan 11,58 persen diserap oleh penyediaan makan minum.

Peranan yang besar ini menunjukkan bahwa permintaan kepada sektor ini sedang tinggi-tingginya. Jadi kedua sektor ekonomi ini perlu didukung agar dalam pemenuhan kebutuhan tidak timpang. Apabila terjadi ketimpangan antara permintaan dan penawaran, akan terjadi gejolak harga. Sesuai dengan hukum ekonomi sederhana, apabila penawaran tinggi namun permintaan rendah, maka harga menurun atau terjadi deflasi. Sebaliknya, apabila permintaan tinggi namun penawaran rendah, maka terjadi kenaikan harga atau inflasi.

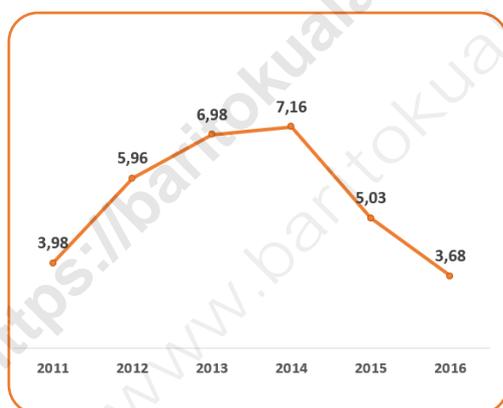
Inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen terdiri dari paket komoditas yang didalamnya tercakup bahan makanan, minuman, makanan jadi, perumahan, biaya kesehatan dan pendidikan, dll. IHK yang kemudian menjadi inflasi perlu dikontrol tiap bulan agar kenaikan harga yang

sedang terjadi tidak berlarut-larut dan bisa ditangani.

Kabupaten Barito Kuala bukan sebagai kota inflasi, sehingga pemantauan harga menggunakan IHK Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dipilih karena dianggap memiliki struktur ekonomi yang serupa. Selain itu, Kabupaten Barito Kuala juga berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin, sehingga aktivitas ekonomi juga masih berkaitan erat antara keduanya.

masalah ketika inflasi tidak terkendali. Dari data IHK Kota Banjarmasin tersebut, menunjukkan bahwa kenaikan harga masih dapat dikendalikan. Tahun 2016 terjadi inflasi sebesar 3,68 persen saja. Artinya secara umum, harga barang-barang naik sebesar 3,68 persen dibanding tahun 2015.

Gambar 7.2. Inflasi Tahunan Kota Banjarmasin Tahun 2011-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin (IHK)

Inflasi Banjarmasin tahun 2014-2016 cenderung turun. Sebenarnya inflasi diperlukan untuk mendorong perekonomian. Namun yang menjadi

<https://baritokualakab.bps.go.id>
www.baritokualakab.bps.go.id



Inti Sari

Inti Sari

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, banyak cara yang dapat dilakukan. Mendorong kualitas pendidikan dan kesehatan tenaga kerja secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Memacu pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat mempermudah akses keluar masuk input dan output hasil perekonomian. Selain cara tidak langsung tersebut, pertumbuhan ekonomi juga dapat didorong dengan memacu sektor-sektor unggulan dalam ekonomi.

Kabupaten Barito Kuala juga dapat melakukan hal-hal tersebut guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor unggulan dapat terus dipacu. Kualitas tenaga kerja dapat terus ditingkatkan. Serta infrastruktur dapat terus dibangun.

Capaian perekonomian yang ada, seharusnya tidak menjadikan puas diri. Menurut hasil SE2016, jumlah usaha di luar sektor pertanian sebanyak 30.637. Usaha-usaha ini mampu menyerap 61.557 orang pekerja. Sektor perdagangan sebagai sektor dengan jumlah usaha terbanyak. Berikutnya adalah sektor penyediaan makan minum. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor perdagangan dan industri pengolahan menjadi yang terbesar.

Dengan mengetahui peranan masing-masing sektor, setiap sektor dapat dipacu dengan karakteristik masing-masing. Misalnya Industri Pengolahan dapat dipacu dengan memberikan kredit bagi UMK. Perdagangan dan penyediaan makan minum dapat dipacu dengan mempermudah akses jalan. Konstruksi dapat dipacu dengan memperbanyak proyek pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, sektor-sektor ini dapat berkembang sesuai dengan target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala.



Catatan Teknis

Catatan Teknis

Metode Penentuan Potensi Wilayah

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah, beberapa metode pengukuran yang umum digunakan antara lain *Location Quotient (LQ)*, *Analisis Shift-Share*, *Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)*, dan *Tipologi Klassen*.

Location Quotient (LQ)

Analisis LQ digunakan untuk menunjukkan besarnya peranan sektor perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan sektor yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial yang menjadi unggulan dan dapat dikembangkan di suatu wilayah. Disamping itu juga digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu wilayah.

Rumus untuk mendapatkan sektor unggulan di suatu wilayah analisis adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{S_{ij}/S_j}{S_{in}/S_n}$$

Keterangan:

S_{ij} : PDRB pada sektor i pada wilayah analisis j

S_j : PDRB pada wilayah analisis j

S_{in} : PDB pada sektor i di wilayah referensi

S_n : PDB di wilayah referensi

Jika berpijak pada data SE2016-L yang menghasilkan indikator jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja, maka PDRB pada rumus di atas dapat menggunakan jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja. Dalam publikasi ini, hanya menggunakan tenaga kerja, dengan mempertimbangkan ketepatan dalam interpretasi. Pengukuran LQ menghasilkan kriteria sebagai berikut:

- Jika $LQ > 1$, sektor i di wilayah analisis j merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi pada wilayah analisis tersebut daripada tingkat tingkat wilayah yang lebih luas lagi (wilayah referensi).
- Jika $LQ = 1$, sektor i di wilayah analisis j bukan merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya sama dengan wilayah referensi.
- Jika $LQ < 1$, sektor i di wilayah analisis j bukan merupakan sektor unggulan, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada wilayah referensi.

Analisis Shift-Share

Analisis *shift share* merupakan salah satu teknik untuk menganalisis data statistik regional, seperti PDRB, tenaga kerja dan lain-lain untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif. Caranya dengan menitikberatkan pada pertumbuhan sektor di suatu wilayah dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dengan data yang terbatas (Firdaus, 2007). Analisis ini merupakan salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi.

Dalam metode ini terdapat 3 bagian yaitu:

Regional Share (RS) merupakan komponen *share* pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal. RS mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijakan nasional yang berlaku.

Proporsional Shift (PS) komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah tersebut yang baik, dengan berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat.

Differential Shift (DS) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah

Shift Share (SS) merupakan penjumlahan dari *Regional Share* dengan *Proportional Share* dan *Differential Share*

Jika ingin melihat keunggulan wilayah di suatu wilayah, maka keempat unsur tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$RS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{Y_t}{Y_0} - 1 \right)$$

$$PS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{y_{it}}{y_{i0}} - \frac{Y_t}{Y_0} \right)$$

$$DS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{y_{ijt}}{y_{ij0}} - \frac{y_{it}}{y_{i0}} \right)$$

$$SS_{ij} = RS_{ij} + PS_{ij} + DS_{ij}$$

Keterangan:

Y_t = PDB wilayah referensi periode akhir tahun.

Y_0 = PDB wilayah referensi periode awal tahun.

y_{it} = PDB wilayah referensi sektor ke-i periode tahun akhir.

y_{i0} = PDB wilayah referensi sektor ke-i periode tahun awal.

y_{ijt} = PDRB wilayah analisis sektor ke-i periode tahun akhir.

y_{ij0} = PDRB wilayah analisis sektor ke-i periode tahun awal.

Interpretasi dari hasil pengukuran diatas sebagai berikut:

- Jika $PS_{ij} > 0$, artinya bahwa sektor i pada suatu wilayah analisis tumbuh lebih cepat daripada sektor i di wilayah referensi, dan sebaliknya.
- Jika $DS_{ij} > 0$, artinya bahwa daya saing sektor i pada suatu wilayah analisis lebih tinggi dari daya saing sektor i di wilayah referensi, dan sebaliknya.
- Jika $SS_{ij} > 0$, artinya terjadi penambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja ekonomi daerah pada sektor i di wilayah analisis tersebut.

Dari ukuran diatas, maka sektor unggulan wilayah adalah sektor-sektor yang mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing suatu sektor menunjukkan potensi yang tinggi untuk dikembangkan.

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Metode MRP melakukan identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage*). MRP membandingkan pertumbuhan suatu sektor pada suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih besar, baik dalam skala besar maupun kecil. Pada analisis ini terdapat dua rasio pertumbuhan yang bisa dihitung yaitu: rasio pertumbuhan wilayah study (RPs), dan rasio wilayah referensi (RPr). Jika ingin melihat sektor unggulan suatu pulau, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$RP_{ip} = \frac{(y_{ipt} - y_{ip0})/y_{ipt}}{(y_{pt} - y_{p0})/y_{p0}}$$

$$RP_{in} = \frac{(y_{int} - y_{in0})/y_{int}}{(y_{nt} - y_{n0})/y_{n0}}$$

Keterangan:

y_{ipt} = PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun akhir.

y_{ip0} = PDRB sektor i wilayah analisis ke p pada periode tahun awal.

y_{pt} = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun akhir.

y_{p0} = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun awal.

y_{int} = PDB sektor i wilayah referensi pada periode tahun akhir.

y_{in0} = PDR sektor i wilayah referensi pada periode tahun awal.

y_{nt} = PDB wilayah referensi pada periode tahun akhir.

y_{n0} = PDB wilayah referensi pada periode tahun awal.

MRP hanya memperhitungkan pertumbuhan sektor, tanpa melihat kontribusi suatu sektor di dalam suatu wilayah. Berikut interpretasi hasilnya:

- Jika nilai RP_{ip} positif dan RP_{in} positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi. Sektor tersebut merupakan potensi baik di tingkat regional maupun global (di level wilayah referensinya).
- Jika nilai RP_{ip} positif dan RP_{in} negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih tinggi dari wilayah referensi. Sektor tersebut merupakan potensi di tingkat regional namun secara global tidak berpotensi.

- Jika nilai RPip negatif dan RPin positif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi. Sektor tersebut merupakan potensi di tingkat global namun secara regional tidak berpotensi.
- Jika nilai RPip negatif dan RPin negatif maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah. Sektor tersebut tidak berpotensi baik di tingkat regional maupun global (wilayah referensi).

Tipologi Klassen

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor di suatu wilayah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih luas dan membandingkan pangsa sektor tersebut dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih luas.

Melalui metode ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan dari sektor ekonomi yang berbeda, yaitu: sektor unggulan dan tumbuh pesat, sektor unggulan tapi pertumbuhannya tertekan, sektor potensial yang berkembang cepat, dan sektor yang tidak potensial. Adapun matriks untuk menentukan tipe karakteristik untuk melihat sektor unggulan di tingkat wilayah analisis adalah sebagai berikut:

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$G_i \geq G$	$G_i < G$
$S_i \geq S$	Sektor unggulan dan tumbuh pesat	Sektor unggulan tetapi pertumbuhannya tertekan
$S_i < S$	Sektor potensial dan masih dapat dikembangkan	Bukan sektor potensial dan tertinggal

Keterangan:

- G_i : Pertumbuhan sektor i di wilayah analisis
 G : Pertumbuhan sektor i di wilayah referensi
 S_i : Kontribusi sektor i di wilayah analisis
 S : Kontribusi sektor i di wilayah referensi

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO KUALA**
Jl. Jenderal Sudirman No. 72 Marabahan 70511
Telp.: (0511) 4799057 Fax.: (0511) 4799057
Website: baritokualakab.bps.go.id